DIGITAL LITERACY REPORT

DEMOKRASI DIGITAL DAN AKTIVISME UMAT ISLAM

Tim Penyusun:

Departemen Media dan Dakwah Digital

Institut Muslimah Negarawan (IMuNe)

1. Yul Rachmawati, S.Hum., M.A

2. Lestari Admojo, M.Sc

DAFTAR ISI

Sampul 1

Daftar Isi 2

Pendahuluan 4

Represi Digital terhadap Rakyat dan Umat Islam 5

Respon Penguasa Indonesia terhadap Gerakan Politik Umat Islam Era Digital 8

Gagasan Demokrasi Digital: Harapan atau Ancaman? 9

Kesimpulan dan Rekomendasi 12

Daftar Pustaka *14*

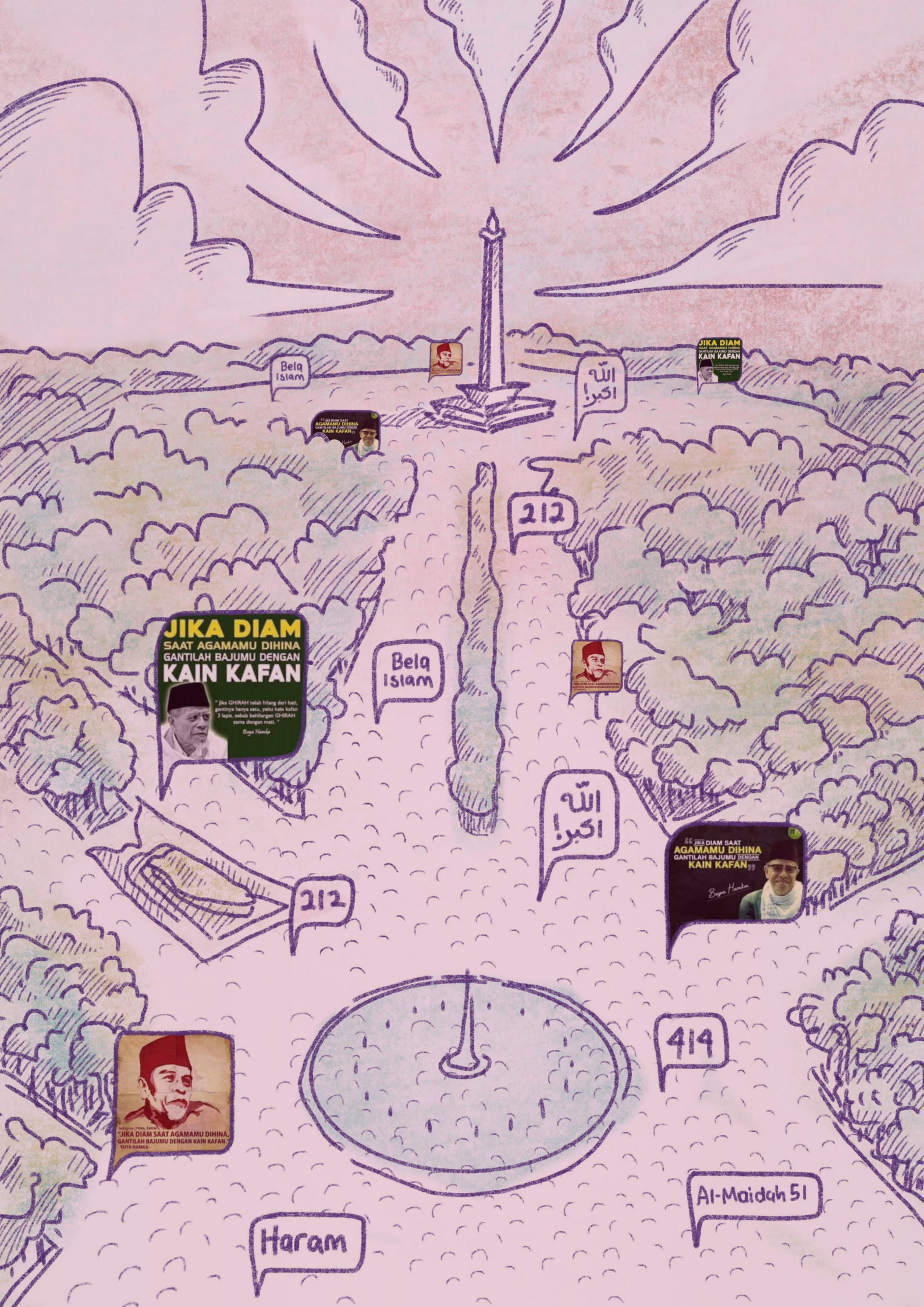
Bela Islam
الله اكبر!
212
JIKA DIAM
SAAT AGAMAMU DIHINA
GANTILAH BAJUMU DENGAN
KAIN KAFAN
" Jika GHIRAH telah hilang dari hati, gantinya hanya satu, yaitu kain kafan 3 lapis, sebab kehilangan GHIRAH sama dengan mati. "
Buya Hamka
Bela Islam
الله اكبر!
212
JIKA DIAM SAAT AGAMAMU DIHINA GANTILAH BAJUMU DENGAN KAIN KAFAN
Buya Hamka
419
"JIKA DIAM SAAT AGAMAMU DIHINA, GANTILAH BAJUMU DENGAN KAIN KAFAN."
-BUYA HAMKA-
Al-Maidah 51
Haram

Demokrasi Era DIgital dan Aktivisme Umat Islam

Departemen Media dan Dakwah Digital

Institut Muslimah Negarawan (IMuNe)

Yul Rachmawati, S.Hum., M.A & Lestari Admojo, M.Sc

Sejarah selalu berbicara bagaimana aktivisme umat Islam selalu mewarnai berbagai upaya pengusiran penjajahan, pembebasan penindasan, penentangan kedzaliman, hingga upaya menyebarkan dakwah dan mengembalikan kehidupan umat Islam yang terenggut oleh pengusaan orang-orang kafir imperialis atas mereka. Semuanya bermuara pada satu hal, bahwa umat Islam adalah umat yang memikul tanggung jawab atas ketaatan kepada Allah SWT. Bahwa mereka hadir untuk menjamin diterapkannya aturan Allah di muka bumi, termasuk dalam aspek kebijakan politik. Aturan yang sejatinya menyatu dengan kehidupan umat Muhammad, dimana aturan itu telah terbukti menjadi rahmat semesta alam bertahun lamanya, sejak Rasulullah Muhammad SAW diutus hingga era kekhilafahan setelahnya. Sayangnya, seringkali perjuangan dakwah umat Islam dipandang sebagai musuh yang harus disingkirkan, hatta oleh penguasa muslim itu sendiri. Penguasa yang sejatinya tidak lagi tunduk pada kepentingan umat Islam namun mengikuti sistem dan arahan kapitalisme sekuler. Termasuk dalam era digital saat ini.

Aktivisme umat Islam era digital telah terjadi di beberapa negara, salah satunya adalah dalam peristiwa Gerakan 212 dan *Arab Spring*. *Arab Spring* berawal di Tunisia yang dipicu oleh aksi Mohamed Bouazizi yang membakar diri sebagai aksi protes. Aksi tersebut disiarkan secara terus menerus oleh youtube dan Al Jazeera hingga berujung pada jatuhnya pemerintahan Ben Ali. Aksi Ini disebut sebagai revolusi dunia pada 2011 yang disiarkan melalui kanal Youtube dan meraih *trending topic* di twitter dengan *hashtag* #tunisianrevolution yang di*mention* sebanyak 196.000 kali oleh sekitar 26.000.000 pengguna di seluruh dunia. Seorang mahasiswa di Mesir juga melakukan revolusi melalui halaman facebooknya untuk mengakhiri kelaparan dan kemiskinan yang melanda Mesir. Aksi tersebut kemudian menyebar dan menimbulkan revolusi di Mesir hingga menuntut diakhirinya pemerintahan Hosni Mubarak pada tahun yang sama.

Negara Timur Tengah lainnya juga mengalami revolusi yang dimulai dari sosial media. Contohnya adalah Libya yaitu ketika Nato menggunakan twitter untuk melacak pasukan Khaddafi. Suriah yang menggunakan youtube sebagai platform menyebarkan protes, kemudian pemuda Yaman menggunakan sosial media untuk melakukan perubahan melalui youtube, twitter, dan facebook serta di Bahrain yang memulai protes menggunakan sosial media.

Aktivisme umat islam di Indonesia mulai muncul saat adanya peristiwa demonstrasi 212 (2 Desember 2016). Hal ini bermula dari sosial media dan menciptakan fenomena baru bernama *street politics*. Hal ini juga dijadikan momentum untuk membentuk kelompok oposisi pemerintah yang disebut Presidium Alumni 212 dan menjadikan jalanan sebagai ruang untuk merepresentasikan kekecewaan sekaligus memperkuat identitas dan solidaritas.

Melihat fenomena pelibatan sosial media, dapat dikatakan bahwa sosial media telah digunakan sebagai alat pergerakan bagi generasi di era digital saat ini. Sayangnya, sosial media juga membuat dinding-dinding pembatas tak kasat mata di era *borderless* baik secara fisik maupun virtual.

Represi Digital terhadap Rakyat dan Umat Islam

Aktivisme umat Islam dibalas oleh penguasa dengan berbagai tindakan represi digital. Demokrasi yang baru lahir di Tunisia tidak sepenuhnya mendukung komisi kebenaran yang menyelidiki kekerasan negara di masa lalu. Sementara di Mesir, terjadi peningkatan represi kontra revolusioner, peningkatan rasio tahanan politik, pemenjaraan jurnalis, lahirnya UU yang mensyaratkan pengguna medsos dengan 5000 pengikut harus mendapatkan lisensi dari pemerintah, serta pemblokiran situs berita dan internet para pengunjuk rasa.

Arab Saudi mencegah media di negara-negara anggota untuk mengkritik kepemimpinan negara-negara anggota lainnya, mengamandemen UU Pers, dan memantau konten sosmed dan youtube warganya. Facebook di Afganistan membentuk tim untuk mengawasi konten-konten Taliban, youtube tidak mengizinkan akun di bawah Taliban, tiktok menetapkan Taliban sebagai teroris dan whatsapp menghapus konten tentang Taliban.

Represi digital juga dilakukan oleh pemerintah nasional Hindu di India kepada muslim Kashmir (Gambar 1). Represi antara lain dengan melakukan *internet shutdown* kepada tujuh juta masyarakat Kashmir, yang merupakan *internet shutdown* terlama yang pernah terjadi selama era demokrasi. Menyebabkan

masyarakat terisolasi dari dunia luar dan menunjukkan pelanggaran terhadap hak akses informasi rakyat. Respon penguasa India semakin menunjukkan paradoks demokrasi yang menjunjung tinggi hak warga negara. Kegagalan demokrasi dalam memenuhi hak rakyat juga terekspos di berbagai negara, yang memicu protes masal seperti di Rusia, Iran, Algeria, Bolivia, Chili, Sudan, India, dan Hongkong (Gambar 2).

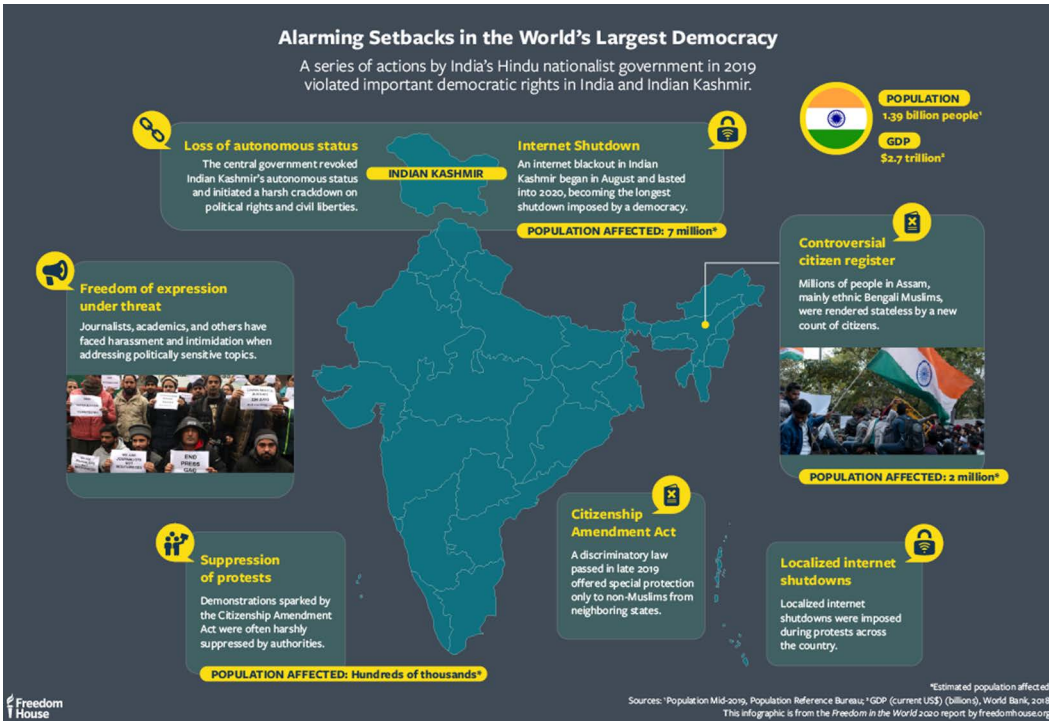

Gambar 1. Represi digital yang dilakukan rezim India terhadap umat Islam di Kashmir

Gambar 2. Aksi protes di berbagai negara merespon diskriminasi demokrasi

Ruang digital yang tidak berpihak terhadap umat Islam juga didukung oleh raksasa platform, baik demi kepentingan pasar maupun demi ikatan yang kuat dengan kekuasaan. Pada tahun 2015, CEO facebook Mark Zukerberg pernah bersumpah untuk membuat platform media sosial miliknya sebagai rumah yang ramah bagi umat muslim setelah anggota komunitas muslim menghadapi reaksi brutal akibat serangan kekerasan yang mengerikan di Paris. Zukerberg memposting di facebook, "*Setelah serangan Paris dan kebencian minggu ini, saya hanya bisa membayangkan ketakutan yang dirasakan umat muslim bahwa mereka akan dianiyaya karena tindakan orang lain. Sebagai pemimpin facebook kita akan berjuang untuk melindungi hak anda, serta menciptakan kedamaian dan lingkungan yang aman untuk anda*". Kenyataannya, kelompok kebencian anti-muslim dan ujaran kebencian tetap merajalela di facebook, baik berupa postingan anti-muslim, iklan, grup pribadi, dan konten lainnya.

Laporan dari tim *Muslim Advocates and the Global Project Against Hate and Extremism* (GPAHE) tahun 2020 yang bertajuk "*Complicit Report: the human cost of facebook's disregard for muslim life*" memuat kegagalan facebook dan merincikan dampak merusak facebook terhadap komunitas muslim dan menunjukkan bagaimana facebook dengan sengaja mengabaikan bahaya yang ditimbulkan oleh konten anti-muslim terhadap keselamatan umat muslim di 9 negara (Cina, Jerman, Hungaria, India, Sri Lanka, New Zealand, AS, Swedia, dan Myanmar). Komitmen facebook nyatanya tidak berjalan ketika berhadapan dengan aksi kekerasan yang menyasar komunitas muslim di berbagai negara.

Simbiosis mutualisma antara facebook dan kekuasaan nyata terjadi di Cina, dimana penguasa Cina memanfaatkan facebook untuk mengkampanyekan tujuan positif dari kamp konsentrasi Uighur, padahal banyak bukti menunjukkan sebaliknya. Facebook juga terbukti menebarkan kebencian terhadap pengungsi Rohingya yang menyebabkan menguatnya dukungan regulasi rezim Myanmar dan maraknya penolakan mereka di berbagai tempat. Penguasa India dan kelompok pembenci juga menebarkan narasi kebencian terhadap muslim di India seperti penyebar virus, mengancam umat hindu, dan sebagainya melalui media sosial, namun tak pernah ada antisipasi dari platform yang bersangkutan.

Respon Penguasa Indonesia terhadap Gerakan Politik Umat Islam Era Digital

Gerakan politik umat Islam era digital ini nampaknya cukup mengguncang kekuasaan para elit di Indonesia, sehingga mereka melakukan berbagai upaya untuk mencegah adanya kebangkitan Islam melalui sosial media. Langkah-langkah yang penguasa lakukan antara lain pengawasan siber, pemblokiran situs, mengkriminalisasi pelopor gerakan massa Islam, mencabut BHP ormas yang dianggap mengancam ideologi negara, serta mengeluarkan regulasi untuk membatasi dan menekan aktivitas politik umat.

Dalam beberapa tahun belakangan ini pemerintah pun semakin serius membendung gerakan islam ideologis dalam ruang publik yang kemudian diejawantahkan dalam kebijakan politik. Dalam pemberlakuan perundang-undangan tercermin dalam UU No.5 Tahun 2018, UU No.16 tahun 2017, dan UU No. 19 tahun 2016. Sementara di ruang publik digital tercermin dengan adanya pemblokiran situs dan media sosial aktivis dan lembaga Islam. Belum lagi banyaknya penangkapan aktivis muslim ideologis. Berikutnya lahirlah UU ITE yang awalnya diharapkan akan melindungi rakyat dari kejahatan digital, namun nyatanya digunakan penguasa untuk menjerat publik yang kritis dengan pasal-pasal karetnya. Revisi UU ITE yang diharapkan menghapus pasal bermasalah nyatanya hanya mengeluarkan panduan interpretasi terhadap pasal-pasal tertentu.

SAFEnet (*Southeast Asia Freedom of Expression Network*) dalam hasil pantauan dan risetnya tahun 2019 juga menunjukkan adanya represi bahkan otoritarian digital oleh penguasa. Banyaknya penangkapan dan kekerasan terhadap para penolak kebijakan pemerintah seperti UU Revisi KPK dan UU Cipta Kerja, beroperasinya *buzzer* (pendengung) untuk mengganggu dan *paid-influencer* untuk "*mengendorse*" kebijakan pemerintah yang kontroversial, serta meningkatnya insiden serangan digital terhadap aktivis yang bersuara vokal, Dari data kasus 2008-2020 yang dikumpulkan SAFEnet menunjukkan aktivis, jurnalis, akademisi kini menjadi pihak yang lebih sering dilaporkan, dimana 38% dari para pelapor UU ITE adalah kalangan pejabat publik. Damar Juniarto, Direktur Eksekutif SAFEnet menilai, bahwa Indonesia tengah menghadapi otoritarianisme digital, dimana ada tiga hal pokok yang dilakukan penguasa yaitu sensor online, pengawasan siber, dan upaya kontrol terhadap infrastruktur yang menyasar publik yang kritis terhadap kekuasaan.

Akhirnya, alih-alih demokrasi era digital membuka ruang untuk menyampaikan pendapat dan gagasan, nyatanya hanya berpihak pada gagasan yang menentang ide dan ajaran Islam. Demokrasi era digital melakukan aksi tebang pilih pada suara-suara yang tidak sepaham dengan kekuasaan dan mengkriminalisasi ide dan aktivisnya hingga terjadi pelemahan secara sistemis. Dapat dikatakan bahwa sosial media pada hari ini mengalami metamorfosis dari bulan madu revolusi menjadi pembungkaman aktivisme umat, yang membuka peluang represi yang lebih besar oleh kekuasaan melalui aktivitas digital.

Gagasan Demokrasi Digital: Harapan atau Ancaman?

Wacana gagasan demokrasi digital yang berharap bahwa perangkat digital dapat mendukung tercapainya tujuan demokrasi kini tengah digaungkan. Demokrasi digital menurut Julie Simon dkk dalam bukunya yang berjudul *Digital Democracy: The tools transforming political engagement* sederhananya adalah praktik demokrasi menggunakan perangkat digital dan teknologi (Gambar 3). Gagasan demokrasi digital ingin menjawab bagaimana perangkat digital dapat mendukung peran dua arah antara penguasa, partai politik, media dan publik sehingga dapat terjalin sinergi, koordinasi dan komunikasi yang lebih baik. Melalui partisipasi elektronik yang tanpa hambatan, maka publik dapat berperan sebagai pengawas proses pengambilan kebijakan, implementasi kebijakan hingga evaluasi kebijakan. Hal tersebut memberikan harapan bahwa era digital seharusnya dapat membuat pelaksanaan demokrasi menjadi lebih baik dan tujuan-tujuan terkait pemenuhan kepentingan publik dapat tercapai. Artinya, represi bahkan otoritarian penguasa seharusnya dapat dicegah. Benarkah demikian?

Gambar 3. Konsep gagasan digital demokrasi yang melibatkan komunikasi dua arah antara publik, media, partai politik dan penguasa.

Alih-alih menawarkan harapan kebaikan penerapan demokrasi, nyatanya disisi lain, kekhawatiran yang timbul dari perangkat digital terhadap pelaksanaan demokrasi pun tidak sedikit yang muncul. *Pew Research Center* tahun 2020 dalam artikelnya yang berjudul *Many tech experts say digital disruption will hurt democracy* meriset pendapat banyak pakar tentang bagaimana era digital sangat berpotensi memperlemah demokrasi, alih-alih diharapkan memperkuat. Problem tersebut dibagi dalam dua bagian besar. Pertama adanya ketidakseimbangan kekuasaan, dimana kekuasaan selalu mencari jalan untuk mempertahankan dirinya dengan membangun sistem demi melayani kepentingannya, bukan kepentingan umum. Kedua adalah tentang isu kepercayaan, bahwa meningkatnya dis-informasi mengikis kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya akan mengacaukan sistem yang ada.

Kekhawatiran berikutnya tentu saja bagaimana otoritarian digital rezim berpotensi muncul dengan melakukan *terror and surveillance capitalism* (pengintaian dan pengendalian oleh raksasa digital) yang dapat digunakan sebagai alat penjajahan mutakhir demi mengendalikan kepentingan ekonomi dan politik suatu negara. Seringnya hal ini bahkan tidak disadari dan tidak pernah mampu untuk dilawan akibat layanan yang sangat dinikmati oleh pengguna platform global (Gambar 4).

Gambar 4. Beberapa laporan yang mengungkap tentang potensi otoritarian digital melalui teror dan pengintaian menggunakan perangkat digital

Terror and surveillance capitalism ini misalnya sangat berhasil dilakukan oleh China, terutama terhadap muslim Uighur. *Terror and surveillance capitalism* bahkan bersifat transnasional, dimana sebuah negara dapat terus merepresi individu atau kelompok sekalipun berpindah kewarganegaraan. Atau menjadi pendorong otoritarian digital sebuah negara lain atau bahkan berkolaborasi. Dalam laporan freedomhouse.org tahun 2018 yang berjudul "*The Rise of Digital Authoritarianism*", disampaikan setidaknya ada 36 negara yang telah mengikuti training manajemen media digital oleh China, termasuk bagaimana menjadikan perangkat digital untuk mengumpulkan data dan mengawasi warganya. Tentu saja, aktivitas tersebut dapat digunakan untuk menyasar komunitas rentan, seperti jurnalis, aktivis, komunitas sipil atau siapapun yang kritis terhadap kebijakan penguasa.

Laporan tahun 2020 yang berjudul *The Pandemic's Digital Shadow* menunjukkan adanya peningkatan represi digital di berbagai negara, seperti undang-undang yang membatasi pendapat publik, pemblokiran aktivitas media sosial, penonaktifan perangkat digital, pengawasan digital hingga pemadaman internet. Penguasaan infrastruktur dan data digital oleh penguasa sangat jelas dapat dimanfaatkan oleh rezim, terutama demi kepentingan mempertahankan kekuasaan dan memuluskan agenda para kapitalis, terlebih dalam sistem dimana penguasa sangat erat bersimbiosis mutualisme dengan para pemilik modal, termasuk dengan para raksasa digital.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan :

Aktivisme umat Islam era digital pernah mempengaruhi pergerakan menuju perubahan seperti *Arab Spring* di Timur Tengah dan Gerakan 212 di Indonesia

Potensi pergerakan umat era digital direspon oleh banyak rezim dengan represi digital melalui berbagai macam kebijakan

Arah kebijakan rezim demokrasi di berbagai negara mengarah pada tindakan otoriter yang sangat bertentangan dengan jargon kebebasan ala demokrasi

Kelemahan mendasar sistem demokrasi menyebabkan dalam era apapun, sistem tersebut tidak mampu mencapai tujuan awal demokrasi, yaitu untuk mengawal kepentingan mayoritas rakyat

Kelemahan mendasar demokrasi justru membuka peluang munculnya rezim otoriter yang bahkan dapat melakukan teror dan pengintaian digital terhadap komunitas rentan seperti jurnalis, aktivis, dan siapapun yang kritis terhadap penguasa

Rekomendasi :

Digitalisasi tak bisa dihindari, namun umat wajib mempersiapkan dan menyesuaikan diri dengan era digital saat ini. Tentu saja, sebagai individu muslim wajib meningkatkan literasi digital agar tidak termakan arus disinformasi dan terlibat pada kegaduhan digital yang tidak produktif. Kritisi terhadap kebijakan digital yang mengancam kepentingan rakyat, termasuk mengungkap bagaimana sistem demokrasi era digital sesungguhnya berpeluang besar mengancam umat. Upaya perbaikan yang coba ditawarkan untuk menambal kegagalan demokrasi, seperti melalui wacana demokrasi digital sesungguhnya hanyalah upaya angan-angan kosong. Demokrasi era digital bahkan berpeluang besar memunculkan rezim yang semakin otoriter dan represif demi mempertahankan kekuasaannya. Demokrasi adalah sistem politik bawaan kapitalisme sekuler yang rusak dan merusak, bahkan sejak asasnya. Kritik terhadap kelemahan mendasar demokrasi harus dilakukan dengan tajam dan mendalam melalui gerakan umat yang masiv, terarah, terkoordinir dan memiliki visi perubahan yang benar

Sebagai bagian dari umat maka penting mengekspos kegagalan sistem sekuler terkait regulasi digital maupun ancamannya di tengah umat, termasuk memanfaatkan media digital untuk mendukung pergerakan politik umat yang terarah, seperti kampanye digital, masivisasi opini, maupun merespon problem dengan lebih tepat dan cepat. Ekspos secara mendalam keburukan sistem dan dampak kebijakannya terhadap umat yang luar biasa semoga dapat membuka kesadaran umat hingga mampu memutus kepercayaan mereka terhadap sistem sekuler, dan hanya berharap pada Islam. *Wallahualam.*

Daftar Pustaka

The Rise of Digital Authoritarianism. Oktober 2018. www.freedomhouse.org. 32p

Sarah Repucci. *A Leaderless Struggle for Democracy*. www.freedomhouse.org. 7p

Out Of Sight, Not Out Of Reach: The Global Scale and Scope of Transnational Repression. Februari 2021. www.freedomhouse.org. 4p

Muslim Advocates & the Global Project Against Hate and Extremism (GPAHE). *Complicit Reort : the human cost of facebook's disregard for muslim life*. Oktober 2020. 44p

Alina Polyakova & Chris Meserole. *Policy Brief Democracy & Disorder : Exporting digital authoritarianism: The Russian and Chinese models*. 22p

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet). *Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2019 : Bangkitnya Otoritarian Digital*. Juli 2020. safenet.or.id. 48p

Adrian Shahbaz & Allie Funk. 2020. *The Pandemic's Digital Shadow*. www.freedomhouse.org. 36p

Maria Josua & Mirjam Edel. *The Arab uprisings and the return of repression*. Mediterranean Politics. Februari 2021. 27p

Simon, J., T. Bass, V. Boelman & G. Mulgan. *Digital Democracy : the tool transforming political engagement*. Februari 2017.

Alisa Shishkina & Leonid Issaev. *Internet Censorship in Arab Countries: Religious and Moral Aspects*. November 2018. Religions (9):358. 14p

Pew Research Center. 2020. *Many tech experts say digital disruption will hurt democracy*. https://www.pewresearch.org/internet/2020/02/21/many-tech-experts-say-digital-disruption-will-hurt-democracy/

INSTITUT MUSLIMAH NEGARAWAN

@imuneofficial Muslimah Negarawan t.me/muslimahnegarawan www.imune.id @IMuNeID